

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERKAIT

A. Kajian Teori

1. Ekologi, Manusia, Sungai, dan Konservasi

Hidup dan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung juga bergantung pada sungai sebagai bagian dari ekologi dan ekosistem. Air mempunyai nilai dari kemanfaatan air sesuai dengan keberadaannya untuk memenuhi kebutuhan yang ditentukan oleh pemanfaat. Air merupakan sumberdaya yang sangat esensial bagi makhluk hidup. Persentasi air yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan makhluk hidup adalah sebesar 0,73%, yaitu berupa air tawar yang terdistribusi sebagai air sungai, air danau, air tanah, dan sebagainya.¹⁵

Ekologi secara etimologi berasal dari *oikos* (rumah tangga) dan *logos* (ilmu) diperkenalkan pertama kali dalam biologi oleh seorang biolog Jerman Ernst Haeckel pada 1866.¹⁶ Menurut Otto Sumarwoto, ekologi atau lingkungan merupakan ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.¹⁷ Sedangkan menurut Charles W. Howe lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik dan kelembagaan. Kondisi fisik mencakup keadaan sumber daya alam, sedangkan bagian kelembagaan dari lingkungan adalah ciptaan

¹⁵ Slamet Suprayogi, Setyawan Purnama, dkk, *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hal.1

¹⁶ Weka Widayati, *Ekologi Manusia: Konsep, Implementasi, dan Pengembangannya*, (Kendari: Unhalu Press, 2011), hal.6

¹⁷ N. Daldjoeni dan A. Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan, dan Pembangunan*, (Bandung: PT. Alumi, 2004), hal. 104-105

manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.¹⁸

Definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya.¹⁹ Apabila melihat definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki kaitan erat yang tidak dapat terpisahkan dari ekologi atau lingkungan tempat dimana manusia hidup dan berkembang. Hidup dan kehidupan manusia tergantung pada lingkungan hidupnya.²⁰

Sedangkan ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berinteraksi sehingga membentuk satu kesatuan. Sistem tersebut mempunyai sifat tertentu, tergantung pada jumlah dan jenis komponen yang menyusunnya. Besar-kecilnya ukuran ekosistem tergantung pada pandangan dan batas yang diberikan pada ekosistem tersebut. Selama hubungan timbal balik antar komponen ekosistem dalam keadaan seimbang, selama itu pula ekosistem berada dalam kondisi stabil.²¹

Ekosistem terdiri atas komponen biotis dan abiotis yang saling berinteraksi membentuk satu kesatuan yang teratur. Dengan demikian, tidak ada satu komponen pun yang berdiri sendiri, melainkan ia mempunyai keterkaitan dengan komponen lain, langsung atau tidak langsung, besar atau kecil.²²

¹⁸ M.Suparmoko, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hal.4

¹⁹ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga 2004), hal.4

²⁰ N. Daldjoeni dan A. Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan, dan Pembangunan*, hal.106

²¹ Chay Asdak, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), hal.10

²² Chay Asdak, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, hal.10

Bila tidak ada aliran air lewat sungai, banyak tempat di dunia akan selalu atau sering tergenang air karena air hujan yang jatuh ke daratan tidak dapat cepat menguap. Aliran air hujan di permukaan tanah yang sering disebut dengan air larian (*run off*) mengalir ke bagian yang berelevasi lebih rendah sesuai dengan hukum gravitasi.²⁴ Bila terjadi pengrusakan hutan sebagai pengatur air utama maka dapat memicu terjadinya banjir.

a. Wilayah sungai adalah kesatuan pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km².

²⁴ Otto S.R. Ongkosongo, *Kuala, Muara Sungai, dan Delta*, (Jakarta: LIPI Pusat Penelitian Oseanografi, 2010), hal.1

- a. Pengaliran massa air yang secara umum bergerak dari arah darat ke laut meskipun pada sungai, bagian sungai, atau kondisi tertentu arahnya dapat sebaliknya.
- b. Erosi atau degradasi, khususnya terjadi di bagian atas, baik erosi secara vertikal dengan penggerusan dasarsungai, atau lateral (kanan-kiri sungai).
- c. Transportasi atau lalu lintas pengiriman material dalam air, khususnya yang berada di bagian tengah atau wilayah peralihan hulu-hilir dari DAS.
- d. Pengendapan yang dilihat dari elevasi (ketinggian suatu tempat terhadap daerah sekitarnya) disebut aggradasi, yang umumnya terjadi di wilayah sungai atau DAS bagian bawah dengan secara langsung membentuk delta

²⁶ Diakses dari <http://pla.deptan.go.id> pada 04 Desember 2016 pada pukul 06.03 WIB

- b. Pengelolaan DAS sebagai sistem perencanaan pengelolaan dan sebagai alat implementasi program pengelolaan DAS melalui kelembagaan yang relevan dan terkait.
- c. Pengelolaan DAS sebagai aktivitas berjenjang dan bersifat sekuensial yang masing-masing berkaitan dan memerlukan perangkat pengelolaan yang spesifik

Kegiatan pengelolaan DAS seringkali terkekang oleh batas-batas yang bersifat politis/administratif (negara, provinsi, kabupaten) yang ikut serta pula didalamnya ego-sektoral dan ego-kedaerahan, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kekutan alam seringkali tidak memandang batas-batas administratif dan ego tersebut. Kejadian-kejadian diluar kendali manusia biasanya berlangsung menurut batas ekologis. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan DAS secara berkelanjutan dan terpadu. Konsep tersebut berlaku pula pada pendampingan yang diupayakan oleh peneliti. Kawasan administratif sungai yang mana masyarakat sekitarnya hendak didampingi terletak di Dusun Singgahan, Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Sedangkan sungai mengalir dari hulu yakni Desa Watulimo hingga Desa Tasikmadu yang terletak di hilir.

Untuk tercapainya pembangunan DAS yang berkelanjutan kegiatan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus diselaraskan. *One river- one plan- one management*, yaitu satu sungai- satu perencanaan- satu pengelolaan dimana dalam pengelolaan wilayah sungai diperlukan perencanaan,

³² Slamet Suprayogi, Setyawan Purnama, dkk, *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, hal.66

IRBM semakin diterima dan secara formal menjadi bagian perencanaan pemerintah. Sayangnya, semakin jelas bahwa IRBM tidak diterapkan dalam semangatnya yang benar sebagaimana pertama kali dibayangkan. Pengelolaan air tetap menjadi kegiatan yang dikontrol secara ketat dan sentralistik. Sebagaimana banyak dilihat, pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*) lebih banyak mendatangkan masalah daripada manfaat.³⁴

Pendekatan ini dibangun dengan landasan bahwa kebijakan pengelolaan air harus didasarkan pada praktik lokal yang ada dalam hal penggunaan air dan tanah secara terpadu. Pendekatan ini tidak menyarankan desentralisasi atau penerapan

³⁵ Dodi Yuniar H, dkk, *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sebuah Pendekatan Negosiasi* diterjemahkan dari *River Basin Management: A Negotiated Approach*, hal.9

Konsep pengelolaan DAS yang baik perlu didukung oleh kebijakan yang dirumuskan dengan baik pula. Dalam hal ini kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS seharusnya mendorong dilaksanakannya praktik-praktik pengelolaan lahan yang kondusif terhadap pencegahan degradasi tanah dan air. Harus selalu disadari bahwa biaya yang dikeluarkan untuk rehabilitasi DAS jauh lebih mahal daripada biaya yang dikeluarkan untuk usaha-usaha pencegahan dan perlindungan DAS. Sasaran dan prinsip-prinsip dalam pengelolaan DAS memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam skala DAS yang melibatkan sumber daya lahan dan air. Kerangka kerja tersebut berupa kegiatan pengelolaan lahan dan konservasi tanah serta air sehingga diharapkan dapat mencapai sasaran dan tujuan pengelolaan DAS.³⁷ Oleh karena itu, pengorganisasian masyarakat diimbangi pula dengan advokasi kebijakan

³⁷ Chay Asdak, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.*, hal.537-538

Pengelolaan DAS dapat berlanjut apabila kebijakan-kebijakan yang melandasi tercapainya pengelolaan DAS berkelanjutan tersebut dapat dirumuskan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan DAS sebagai berikut:

- a. Mengenali hal-hal yang menjadi tuntutan mendasar untuk tercapainya usaha-usaha penyelamatan lingkungan dan sumber daya alam.
- b. Memasukkan atau mempertimbangkan dalam kebijakan yang tidak diperhitungkan secara komersial.
- c. Menyelaraskan atau rekonsiliasi atas konflik-konflik kepentingan yang bersumber dari penentuan batas-batas alamiah dan batas-batas politis/administratif.
- d. Menciptakan investasi (sektor swasta), peraturan-peraturan, insentif, dan perpajakan yang mengaitkan adanya interaksi antara aktivitas tata guna lahan di daerah hulu dan kemungkinan dampak yang ditimbulkannya di daerah hilir. Dengan kata lain, keuntungan yang diperoleh oleh kelompok masyarakat (petani, industri) di daerah hilir karena berkurangnya sedimentasi, tidak boleh menjadi beban bagi masyarakat yang tinggal di daerah hulu karena mereka harus mengorbankan sebagian tanah atau modal untuk melaksanakan kegiatan konservasi tanah dan air.³⁸

[illegible]

⁴² Robert J. Kodoatie dan Sugiyanto, *Banjir: Beberapa Penyebab dan Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hal.80

Berdasarkan karakteristik DAS, kemudian diidentifikasi masalah-masalah dari berbagai aspek yaitu: hidrologi, lahan, sosial-sektoral, dan kelembagaan. Identifikasi masalah dari aspek aspek seperti:

- [illegible]

Apabila berbicara mengenai perubahan tata guna lahan dan praktek pengelolaan daerah aliran sungai, maka tidak akan lepas dari terjadinya erosi. Pada penjabaran fungsi sungai diatas telah dijelaskan bahwa fungsi wilayah sungai juga mencakup sebagai wilayah erosi atau degradasi, khususnya terjadi di bagian atas, baik erosi secara vertikal dengan penggerusan dasar sungai, atau lateral (kanan-kiri) sungai.⁴⁷

⁴⁵ Chay Asdak, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, hal.541

⁴⁶ Slamet Suprayogi, Setyawan Purnama, dkk, *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, hal.119

[illegible]

⁴⁹ Chay Asdak, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, hal.344

longsor, dapat mempertajam kelokan sungai dan dapat menjadi penyebab utama terjadinya erosi sepanjang tebing sungai. Bagian tebing sungai yang memiliki potensi besar untuk terjadinya erosi sungai adalah pada tikungan-tikungan sungai karena gaya benturan aliran sungai di tempat tersebut adalah besar. Erosi tebing sungai dapat dikurangi dengan cara penanaman vegetasi sepanjang tepi sungai. Vegetasi ini, melalui sistem perakaran, tidak saja menurunkan laju erosi, tetapi juga mencegah tanah longsor di daerah tersebut karena mengurangi kelembaban tanah oleh adanya proses transpirasi.⁵⁰

⁵⁰ Chay Asdak , *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, hal.344

Hal ini dilakukan dengan melakukan pengorganisasian masyarakat untuk bersama-sama melakukan penanaman tanaman konservasi di lahan-lahan milik Perhutani yang disewa oleh masyarakat dengan sistem bagi hasil maupun pada lahan pribadi milik masyarakat. Sedangkan harmonisasi aspek manusia dilakukan dengan melakukan pendidikan dialogis mengenai pentingnya hidup harmonis dengan sungai dan lingkungan yang dilanjutkan dengan membentuk komitmen bersama dalam melestarikan sungai dan lingkungan.

Konservasi harus dilakukan dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip keadilan, yakni 1) *conservation of option*, menjaga agar generasi mendatang dapat memilih kuantitas keanekaragaman sumber daya alam, 2) *conservation of quality*, menjaga kualitas lingkungan agar lestari, 3) *conservation of access*, menjamin

generasi mendatang minimal memiliki akses yang sama dengan generasi sekarang atas kekayaan alam yang diciptakan dan disediakan Tuhan.⁵²

2. Memahami Konsep Pengorganisasian

Pengertian pengorganisasian rakyat atau yang lebih dikenal dengan ‘Pengorganisasian Masyarakat’ mengandung pengertian yang luas dari kedua akar katanya. Istilah rakyat tidak hanya sekadar mengacu pada perkauman (*community*) yang khas dalam konteks yang lebih luas, juga pada masyarakat (*society*) pada umumnya. Istilah pengorganisasian lebih dimaknai sebagai suatu kerangka menyeluruh dalam rangka memecahkan masalah ketidakadilan sekaligus membangun tatanan yang lebih adil. Mengorganisir masyarakat sebenarnya merupakan akibat logis dari analisis tentang apa yang terjadi, yakni ketidakadilan dan penindasan di sekitar kita. Pengorganisasian sama sekali tidak netral. Melakukan pengorganisir berarti berani melakukan proses melibatkan diri dan memihak kepada rakyat yang tertindas.⁵³

Pengorganisasian rakyat juga berarti membangun suatu organisasi, sebagai wadah atau wahana pelaksanaan berbagai prosesnya.⁵⁴ Pengorganisasian seringkali mengalami pendangkalan makna, baik disadari atau tidak, pemaknaan bahwa pengorganisasian sudah terjadi jika sudah terbentuk organisasi rakyat dengan susunan kepengurusan, anggota, program kerja, dan aturan-aturan organisasi. Padahal sebenarnya tidak demikian. Pengorganisasian rakyat haruslah

⁵² Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hal.1

⁵³ Agus Affandi, dkk, *Modul Participatory Action Research*, (Suarabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2016), hal.197-198

⁵⁴ Jo Hann Tan dan Roem Topatimasang, *Mengorganisir Rakyat*, (Yogyakarta: INSISTPress, 2003), hal.15

Terdapat berbagai macam tujuan dalam pengorganisasian masyarakat.

Diantara tujuan tersebut adalah:

- a. Pemberdayaan Masyarakat. Melalui proses pengorganisasian masyarakat, rakyat akan belajar bagaimana mengatasi ketidakberdayaan (*powerless*) dengan menganalisa struktur maupun lembaga yang menindas sekaligus mengembangkan kapasitas dirinya dengan menemukan strategi pemecahan-pemecahan masalah secara mandiri.
- b. Membangun struktur dan organisasi masyarakat yang kuat dan tepat sehingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik jangka pendek seperti terpenuhinya kebutuhan dasar yakni sandang, pangan, papan, ataupun jangka panjang seperti menciptakan iklim yang kondusif dalam pengembangan SDM.⁵⁶

Pengorganisasian dan pemberdayaan yaitu dua pendekatan yang bisa dipecahkan ke dalam beberapa perspektif sesuai dengan beragam jenis dan praktik pengorganisasian dan pengembangan masyarakat yang meliputi:

⁵⁶ Agus Affandi, dkk, *Modul Participatory Action Research*, hal.198-200

Prinsip-prinsip pengorganisasian masyarakat yang harus dimiliki dan dibangun dalam diri para pengorganisir masyarakat (*community organizer*) adalah meliputi:

- a. Membangun etos dan komitmen *organizer*. Etos dan komitmen seorang *community organizer* merupakan prinsip utama agar mampu bertahan menghadapi banyak tantangan dan berhasil membawa sebuah perubahan bersama masyarakat.⁵⁸

⁵⁸ Agus Affandi, dkk, *Modul Participatory Action Research*, hal.202

pendapatnya dan menjadi lebih kritis pada sistem atau struktur yang tidak adil dan memiskinkan, termasuk lebih kritis melihat bagaimana sistem yang berlaku saat ini telah mengubah/memengaruhi diri mereka sendiri secara mendalam.⁵⁹

a. Memulai pendekatan. Pendekatan dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi di masyarakat. Kiat dan media kreatif sangat dibutuhkan dalam memulai pendekatan karena pengorganisir dituntut kreatif dan banyak akal. Disamping itu, pengorganisir juga harus dapat bersengaja menciptakan peluang keseimbangan gender serta dituntut untuk dapat menguasai keadaan ketika dihadapkan pada tantangan yang bersifat mendadak. Apabila pengorganisir mampu menemukan pintu masuk atau kunci yang menentukan untuk mulai membangun hubungan dengan masyarakat setempat, maka hubungan awal baru saja dimulai.⁶²

⁶¹ Marsen Sinaga, *Pengorganisasian & Hal-hal Yang Belum Selesai*, hal.78

[illegible]

⁶⁵ Jo Hann Tan dan Roem Topatimasang, *Mengorganisir Rakyat*, hal.75-90

f. Membangun sistem pendukung. Bekerjasama atau mendapat dukungan dari pihak luar merupakan hal yang diperlukan untuk membangun sistem pendukung, namun tetap dengan kehati-hatian agar yang sebelumnya dimaksudkan sebagai sistem pendukung tidak menjadi bumerang dan berbalik arah menjadi tempat bergantung. Pendidikan dan pelatihan bagi warga dan anggota organisasi rakyat setempat merupakan salah satu inti proses pengorganisasian yang terpenting, dukungan penelitian, kajian, dan informasi serta sarana dan prasarana kerja merupakan sistem pendukung yang dapat dibangun untuk memperkuat kerja pengorganisasian.⁶⁷ Satu kunci keberhasilan proses pengorganisasian rakyat adalah memfasilitasi mereka sampai akhirnya mereka dapat memiliki suatu pandangan dan pemahaman bersama mengenai keadaan dan masalah yang mereka hadapi.⁶⁸

Lingkungan hidup (*al-'alam*) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Keberagaman unsur lingkungan hidup membentuk sebuah hubungan tarik-menarik antara komponen yang satu dengan yang lain. Apabila

⁶⁸ Jo Hann Tan dan Roem Topatimasang, *Mengorganisir Rakyat*, hal.10

Pada mulanya, permasalahan lingkungan hidup lebih banyak disebabkan oleh faktor lingkungan itu sendiri dan bencana alam. Ketika manusia muncul sebagai penghuni dari komunitas dalam alam raya, maka manusialah yang memegang dominasi kerusakan lingkungan hidup. Kenyataan tersebut seperti firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 41:⁷¹

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan

⁶⁹ Shinta Dewi Rismawati, “*Pelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Air dalam Perspektif Hukum Islam*” dari Jurnal Hukum Islam, Vol.1, No.1, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2003), hal.100

⁷⁰ Nur Afriyah Febriani, *"Implementasi Etika Ekologis dalam Konservasi Lingkungan: Tawaran Solusi dari Al-Ouran"* dari Jurnal Kanz Philosophia, Vol.4 No.1, 2014, hal.29

⁷¹ Shinta Dewi Rismawati, “*Pelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Air dalam Perspektif Hukum Islam*” dari Jurnal Hukum Islam, Vol.1, No.1, hal.102-103

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁷²

M Quraish Shihab menafsirkan, kata *zhahara* pada mulanya berarti *terjadinya sesuatu di permukaan bumi*. Sehingga, karena dia dipermukaan, maka menjadi nampak dan terang serta diketahui dengan jelas. Sedangkan kata *al-fasad* menurut Al-shafani adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Kata ini digunakan menunjuk apa saja, baik jasmani, jiwa, maupun hal-hal lain.⁷³ Ayat ini merupakan larangan kepada manusia agar tidak menjadi perusak di bumi. Perusakan adalah salah satu bentuk pelampauan batas. Oleh karena itu ayat ini melanjutkan tuntunan ayat yang lalu dengan menyatakan : dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah memperbaikannya yang dilakukan oleh Allah. Alam raya telah diciptakan Allah SWT, dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memeritahkan hamba-hambanya untuk memperbaikinya.

Ayat diatas menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya *fasad* itu. Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, yang hasilnya keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Inilah yang mengantar sementara ulam kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan.⁷⁴

Sedangkan menurut Ibnu Katsir mengemukakan dalam tafsirnya yang diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy yaitu Allah SWT berfirman bahwa kerusakan di darat, di kota dan di desa-desa dan di laut yang meliputi

⁷² Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:PT Karya Toha Putra Semarang,1996), hal.647

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal.76

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hal.76

⁷⁷ Fachrudin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2005). hal.xiv-xviii

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Firman Allah tersebut menegaskan larangan bagi umat manusia untuk melakukan tindakan destruktif terhadap lingkungan hidupnya yang pada akhirnya merugikan kehidupan manusia itu sendiri. Pada sisi lain, ayat tersebut mengisyaratkan agar manusia senantiasa menjaga kelestarian lingkungan demi eksistensi manusia itu sendiri. Ini karena pada hakekatnya manusia diberi kuasa untuk memanfaatkan potensi alam sekaligus dibebani kewajiban untuk menjaga kelestariannya.⁸⁰

⁸⁰ Shinta Dewi Rismawati, “*Pelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Air dalam Perspektif Hukum Islam*” dari Jurnal Hukum Islam, Vol.1, No.1, hal.108

Islam memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

⁸¹ Anggota Ikapi, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan Salim Bahreisy dan Said bahreisy, jilid III, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2006), hal.422.

[illegible]

4. Halal haram berarti *item-item* hukum yang akan mengendalikan perilaku manusia agar tidak merusak tatanan teratur dalam ekosistem dan tata kehidupan masyarakat.⁸⁶

Sedangkan bentuk konkret dari konservasi, terutama konservasi alam sendiri dalam Islam adalah seperti berikut:

- a. *Hima'* adalah suatu kawasan yang khusus dilindungi oleh pemerintah (imam negara atau khalifah) atas dasar syariat guna melestarikan hidupan liar serta hutan. Nabi pernah mencagarkan kawasan sekitar Madinah sebagai *hima'* guna melindungi lembah, padang rumput dan tumbuhan yang ada didalamnya. Nabi melarang masyarakat mengolah tanah tersebut karena lahan itu untuk kemaslahatan umum dan kepentingan pelestariannya. Rasulullah mncagarkan lahan perlindungan sebagai fasilitas umum yang tidak boleh dimiliki siapapun.
- b. *Ihya Al-mawat* (menghidupkan tanah yang mati) merupakan salah satu khasanah hukum Islam yang juga dijumpai dalam syariat. Arti harfiah dari *ihya al-mawat* adalah usaha mengelola lahan yang masih belum bermanfaat menjadi berguna bagi manusia. Memakmurkan tanah (termasuk di dalamnya membuat sumur, mengalirkan sungai, menanam pohon, mengurangi lahan kritis) sehingga makhluk di bumi mendapatkan maslahat atau dapat mengambil makanan darinya maka akan dicatat sebagai suatu ibadah.⁸⁷

⁸⁶ Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal.7-33

⁸⁷ Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam*, hal.53-67

B. Penelitian Terkait

1. Penelitian dari Jurnal Sosial dan Ekonomi Kehutanan Volume 11 No.3 September 2014 dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) Di Sub DAS Keduang, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Fokus yang diambil oleh penelitian ini adalah konservasi sub daerah aliran sungai Keduang. Tujuan penelitian terdahulu ini hanya sebatas ingin mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan konservasi sub daerah aliran sungai Keduang yang dilakukan bersama Balai Penelitian Pengelolaan Kehutanan Daerah Aliran Sungai Solo (BPTKPDAS Solo), Pusat

[illegible]

2. Penelitian terdahulu dari Jurnal Penyuluhan Maret 2014 Volume 10 No.1 dengan judul Partisipasi Masyarakat terhadap Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cikapundung di Kelurahan Dago Bandung, berfokus pada hal yang sama yakni pengelolaan daerah aliran sungai. Tujuan penelitian terdahulu adalah menganalisis tingkat partisipasi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap masyarakat Kelurahan Dago, Bandung, Jawa Barat terhadap kegiatan pengelolaan DAS, serta menganalisis hubungan antara intensitas sikap masyarakat dengan tingkat partisipasinya terhadap kegiatan pengelolaan DAS di Kelurahan Dago. Penelitian terdahulu tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan survey yang menghasilkan kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan

3. Penelitian ketiga adalah tesis dengan judul Kajian Konservasi Lahan di Hulu DAS Citarum dalam Upaya Mendukung Pengembangan Wilayah Berbasis Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan di Desa Sukamanah. Tujuan penelitian ini adalah mengamati dan mengevaluasi pelaksanaan konservasi di Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara dan survey yang menghasilkan kesimpulan bahwa konservasi yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah praktik konservasi yang seharusnya.

Selain itu baik tujuan maupun hasil yang dikehendaki dari penelitian[penelitian tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti sekarang. Penelitian-penelitian terdahulu lebih menekankan pada penilaian tingkat

partisipasi masyarakat yang dilakukan melalui pengamatan dengan peneliti sebagai pihak eksternal. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti bertujuan mengorganisir masyarakat sehingga dapat memunculkan masyarakat yang berkuasa atas dirinya sendiri dan dapat mengkritisi keadaan sekitarnya sehingga mampu memecahkan masalah yang dihadapi dan melakukan perencanaan serta perubahan secara mandiri. Peneliti tinggal bersama masyarakat (*live in*) sebagai fasilitator yang ikut terlibat dalam semua kegiatan yang disepakati bersama masyarakat.

